

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan, mengenai efektifitas kebijakan pendekatan *programmatic* dengan pendekatan *movement* dalam penyediaan akses layanan pendidikan, dapat ditarik sebuah kesimpulan, di antaranya;

1. Akses layanan pendidikan di Indonesia meliputi, ketersediaan jumlah sekolah, fasilitas pendidikan yang memadai, dan pemerataan pendidikan. Ketiga akses layanan pendidikan tersebut belum bisa berjalan dengan baik. Namun pemerintah sedang mengupayakan agar akses layana pendidikan dapat dinikmati oleh setiap anak di Indonesia, contohnya KIP (Kartu Indonesia Pintar).
2. Jika dilihat dari sisi pendekatannya, kebijakan *programmatic* sama dengan kebijakan *Man-Power Approach*. Pendekatan ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan, dan pendekatan ini lebih cenderung otoriter.
3. Kebijakan *movement* sama dengan kebijakan *Social Demand Approach*. Yaitu suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat.

4. Jika dikaji lebih jauh mengenai mana yang lebih efektif di antara dua pendekatan tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan *movement* lah yang lebih efektif. Karena masalah pendidikan di Indonesia ini sangat banyak dan begitu kompleks, dari pusat hingga pelosok negeri. Hal ini perlu solusi yang harus dipecahkan bersama-sama. Dengan pendekatan *movement*, maka akan banyak relawan, dari aktivis, pegiat, lembaga, instansi, ikut bergabung dan bersama-sama turun tangan di dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia.
5. Tanpa mengesampingkan pendekatan *programmatic*, karena pendekatan jenis ini juga memiliki keunggulan, yaitu orientasinya berjangka panjang dan sistematis. Namun setelah dikaji lebih dalam, pendekatan jenis ini justru memiliki banyak kekurangan. Yang paling mendasar adalah, lebih bersifat *Man-Power Approach*, artinya kecenderungan ke arah otoriter lebih besar. Sehingga berdampak kepada kurangnya pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut andil dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia.
6. Dalam pelaksanaannya, antara pemerintah dan masyarakat harus menjadi mitra yang baik. Saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Pemerintah dengan kebijakannya memberikan ruang yang

cukup untuk masyarakat melakukan sesuatu, dengan berkontribusi bagi negaranya di dalam dunia pendidikan. Sedangkan masyarakat terus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dengan turut serta mengiringi arah pergerakannya, yaitu sebagai *check and balance*.

## B. Saran-saran

### 1. Untuk Para Peneliti

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian, dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kajian atau telaah mengenai tema yang bersangkutan. Baik tentang kebijakan *programmatic* maupun *movement*. Oleh karena itu, masih perlunya diadakan penelitian lanjutan untuk menambah khazanah keilmuan tentang studi kebijakan. Khususnya kebijakan pendidikan.

### 2. Untuk Masyarakat

Setelah dibukanya kran demokrasi, hingga merambah ke dalam dunia pendidikan, sehingga masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Melalui semangat gerakan, diharapkan agar semakin banyak masyarakat yang peduli dengan bangsanya, merasa memiliki masalah bersama, khususnya dalam dunia pendidikan.

### 3. Untuk Pemerintah

Di era yang semakin modern ini, pemerintah sudah seharusnya mengubah paradigma kebijakan yang diambil, khususnya dalam dunia pendidikan. Yang awalnya masih cenderung otoriter, harus berpindah kepada demokrasi. Kebijakan

yang masih bersifat sentralistik, juga harus diubah menjadi desentralistik. Pemerintah harus menyadari, bahwa masalah pendidikan di Indonesia begitu kompleks, butuh solusi dan penanganan yang tepat. Memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk bersama-sama menuntaskan masalah pendidikan di Indonesia. Selain memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berkontribusi, pemerintah juga perlu memberikan fasilitas, baik materil maupun non materil.